

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Suryanto & Sutopo, *Pelayanan Prima, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Dwiyanto, A. 2007. "Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance", dalam *Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.

Hardiyansya. 2011. *Kualitas Pelayanan Public*. Yogyakarta : Gava Media

Laica Marzuki, 1996, *Peraturan Kebijaksanaan Hakikat Serta Fungsinya*

Moenir A.S, 2016, *Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta : As Publishing.

_____, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Philipus M Hadjon, dkk. 1994. *Pengantar Hukum Adminsitasi Indonesia*. Jogyakarta, Gadjahmada Press.

Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers.

Ryaas Rasyid. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Adminitrasi di Indonesia*. PT. Jakarta : Pustaka LP3ES

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet.ke-3, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,. 2008)

Sutarto dkk. 1982. *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.

Syachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992)

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik)*. Depok : Rajawali Pers.

Syafii Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama.

The Liang, Gie 1980. *Dasar-Dasar Administrasi*, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah. Jakarta : Pradnya Paramita

Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru Jilid I dan II*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soewarno Handyaningrat. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung

Internet

<https://dukcapil.makassar.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada pukul 08:30 WITA, tanggal 10 November 2021.

<https://risnamuliyanti.blogspot.com/2015/02/administrasi-publik-di-indonesia.html>, diakses pada pukul 09:30 WITA, tanggal 10 November 2021.

<https://dukcapil.makassar.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada pukul 08:30 WITA, tanggal 10 November 2021.

<https://risnamuliyanti.blogspot.com/2015/02/administrasi-publik-di-indonesia.html>, diakses pada pukul 09:30 WITA, tanggal 10 November 2021.

Jurnal

Abdul Mahsyar 82 Vol. I, No. 2, Oktober 2011 *Pelayanan publik*

Skripsi

Elisabeth Kezia Devantie, 2018, *Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Penerbitan E-KTP Di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat*. Skripsi, Universitas Diponegoro.

Tesis

Tesis Agus Razikin, 2010, *analisis kinerja pelayanan publik PDAM Surakarta di kecamatan jebres, Surakarta*.

Tesis riwan novandi 2009, *analisis persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada bagian administrasi kemsyarakatan dan kesejahteraan rakyat, medan*.

Disertasi

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta dampaknya terhadap Pengembangan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggara Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Peraturan Walikota No. 94 tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jalan St. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636



STANDAR PELAYANAN (SP)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Nomor : 477/517/Dukpil/XI/2019
 Tanggal : 04 Nopember 2019

1. Standar Pelayanan Publik Surat Pindah Keluar Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Surat Pindah Keluar
2	Persyaratan	1. KK asli beserta 2. foto pemohon sebanyak 2 lembar ukuran 3x4 3. Surat Permohonan pihak yang akan pindah
3	System, mekanisme dan prosedur	1. Petugas loket kelengkapan berkas pemohon 2. Petugas loket melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap diteruskan ke petugas operator untuk di daftar. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon 3. Setelah pengajuan dan verifikasi untuk tanda tangan elektronik melalui aplikasi, maka Surat Keterangan Pindah WNI siap untuk dicetak setelah mendapat persetujuan TTE oleh Kepala Dinas 4. Petugas registrasi melakukan penomoran Surat Pindah Keluar yang sudah tercetak dan meneruskan kepada Petugas Locket. 5. Petugas Locket menyerahkan Surat Pindah Keluar kepada Pemohon. 6. Petugas arsip menerima dan menyimpan Register
		berkas Surat Pindah keluar ke bagian pengarsipan
4	Jangka waktu pelaksanaan	3 hari kerja
5	Biaya	Gratis berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Ruang pengaduan 2. Kotak saran 3. website : dukcapil-makassar.com 4. facebook : Dukcapil Makassar 5. e-mail : dukpilmks@yahoo.co.id

* SURAT PERNYATAAN *

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini ----

Nama = ISYAH
NIK = 7371115008710009
Alamat = BTP Blok AP No 264

Memberi izin Pindah kepada Suami saya Yang bernama

Nama = BALING
NIK = 7371110805730010
Alamat = BTP Blok AP No 264

Dengan alasan kerendahan untuk urusan pekerjaan dan apabila suatu hari, terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kami tidak akan memberatkan pihak manapun. Atas bantuan bapak/ibu kami berterima kasih.

Makassar, 11-03-2022



Saya yg bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hamonangan Nababan

Alamat : Jl. Ratulangi No. 31 MK

Pekerjaan : Wiraswasta

mengatakan tidak keberatan atas
pindahny anak dan istri sy ke
Maluku. Saya tetap bertanggung jawab
atas apa terhadap anak dan istri sy.
jika terjadi permasalahan di kemudian hari

MAKASSAR. 24-03-2022



(Hamonangan Nababan)